



## PENGARUH POLITIK KOLONIAL DAN DESENTRALISASI DI DAERAH JAMBI 1906-1942

Rahma Dwi Ardita<sup>1</sup>, Lisa Rukmana<sup>2</sup>

[rahmadwiartika@gmail.com](mailto:rahmadwiartika@gmail.com)<sup>1</sup>, [lisarukmana@unja.ac.id](mailto:lisarukmana@unja.ac.id)

Universitas Jambi

### Informasi Artikel

#### Kata Kunci:

Desentralisasi, Keresidenan Jambi, Politik kolonial

#### Keywords:

Colonial politics, Decentralization, Jambi Residency



This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Copyright ©2023 by Author.

Published by Universitas Jambi

### ABSTRAK

Penulisan kesultanan Melayu Jambi berakhir tahun 1904, ketika Belanda berhasil memenangkan perang melawan rakyat Jambi dan gugurnya Sultan Thaha Saifuddin pada 27 April 1904. Dengan gugurnya Sultan Thaha maka berakhirlah kesultanan Melayu Jambi yang digantikan dengan Keresidenan dibawah kekuasaan Belanda. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh politik kolonial dan desentralisasi di daerah Jambi 1906-1042. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yakni: Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi, dan Historiografi. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dampak dari adanya desentralisasi ini sangat menguntungkan bagi pihak Belanda maupun rakyat Jambi, dimana perekonomian Jambi pada saat itu berkembang dengan pesat dan Belanda dapat meningkatkan taraf hidup warga negaranya di daerah Jajahannya dengan membentuk Keresidenan Jambi.

### ABSTRACT

*This Jambi Malay sultanate ended in 1904, when the Dutch won the war against the Jambi people and the death of Sultan Thaha Saifuddin on April 27, 1904. With the death of Sultan Thaha, the Jambi Malay sultanate ended which was replaced by a Residency under Dutch rule. This research was conducted to determine the influence of colonial politics and decentralization in Jambi 1906-1042. This study uses historical research methods namely: Heuristics, Source Criticism, Interpretation, and Historiography. From the results of this study it can be seen that the impact of decentralization was very beneficial for the Dutch and the Jambi people, where Jambi's economy at that time was developing rapidly and the Dutch were able to improve the standard of living of their citizens in their colony by forming the Jambi Residency.*

### PENDAHULUAN

Secara geografis Provinsi Jambi terletak di bagian timur pulau Sumatera. Dengan keadaan alamnya yang berupa daratan dan perairan (Putra, 2018:2). Batas-batas daerah Jambi dapat dilihat dari catatan-catatan tambo adat atau catatan sejarah klasik. Adapun batas-batas wilayah Jambi yakni sebelah utara dibatasi oleh Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat, sebelah selatan dibatasi oleh Provinsi Sumatera Selatan, sebelah barat dibatasi oleh Provinsi Bengkulu, dan sebelah timur dibatasi oleh Selat Berhala (Margono dkk, 1984:5).

Sebelum datangnya belanda dan Jepang, daerah Jambi merupakan sebuah kerajaan atau Kesultanan Jambi yang berdiri bersamaan dengan berkembangnya Islam di wilayah pantai timur Sumatera (Anri, 2014:7). Secara geografis, kerajaan Jambi terbagi mejadi 2 bagian yakni bagian hulu yang berupa daerah aliran sungai. Aliran ini meluputi sungai Tabir, Batang Tebo, Merangin, Jujuhan, Tungkal Ulu dan Pangkalan

Jambu. Dan bagian hilir yang merupakan tempat pertemuannya Sungai Batang Hari dengan Batang Tembesi sampai ke perbatasan Palembang. (Harun dan Sagala, 2013:89).

Awal berdirinya kerajaan Jambi bermula ketika anak dari Raja Turki yang bernama Ahmad Barus II dengan gelar Datuk Paduka Berhalo dari Kesultanan Utsmaniyah Turki terdampar di Pulau Berhalo. Kedatangan Datuk Berhalo dipandang sebagai arah baru dalam pemerintahan kerajaan Jambi yang berubah menjadi Kesultanan Jambi. Datuk Paduka Berhalo menikah dengan Putri Selaras Pinang Masak yang merupakan Raja Jambi yang berasal dari Pagaruyung (Sumarni, 2022:3). Interaksi Kesultanan Jambi dengan Belanda terjadi sejak masa pemerintahan pangeran Kedak gelar Sultan Abdul Kahar (1615-1643).

Kedatangan Belanda ke Jambi bertujuan untuk mendirikan kantor dagang VOC yang berlokasi di Muara Kumpeh, namun Kantor dagang VOC ini terpaksa ditutup tahun 1625 dikarenakan sulitnya memperoleh hasil hutan dari penduduk. Ditahun 1636 Belanda kembali lagi ke Jambi untuk membuka Kantor dagang VOC, karena mengetahui adanya perselisihan sultan Jambi dan sultan Johor. Dengan adanya perselisihan tersebut Belanda memanfaatkan kesempatan yang ada sehingga pada tahun 1643 Depati Anom membuat kerja sama dengan Belanda dalam bidang perdagangan dan pemerintahan. Dengan demikian semenjak kesultanan dipimpin oleh Depati Anom pemerintah mulai ikut turun tangan dalam urusan pemerintahan dan perdagangan (Margono dkk, 1984:32).

Pada masa pemerintahan Sultan Thaha Saifuddin (1855-1904) secara terang-terangan ia mengumumkan tidak mau mengakui kekuasaan Belanda dan tidak mau mengadakan rundingan apapun dengan mereka. Hal itu membuat Belanda marah dan mengancam Sultan Thaha untuk turun dari tahtanya. Sultan Thaha merupakan sultan terakhir yang memimpin kerajaan Jambi dengan semangat juangnya yang tinggi untuk mengusir Belanda dari Daerah Jambi dengan berbagai pertempuran yang dipimpin langsung oleh Sultan Thaha. Wafatnya Sultan Thaha pada tahun 1904 membuat perlawanan rakyat Jambi terhadap Belanda berakhir (Masjkuri, 1979). Dengan wafatnya Sultan Thaha membuat kesultanan Jambi jatuh ditangan Belanda, pada tahun 1906 belanda mendirikan suatu Keresidenan sebagai pengganti dari Kesultanan Jambi.

Berdasarkan uraian di atas, Keresidenan merupakan sesuatu yang baru yang dibentuk pemerintah Belanda setelah terbitnya undang-undang desentralisasi pada 1903. Keresidenan Jambi berdiri pada 1906 setelah runtuhnya kekuasaan Kesultanan, sehingga hal inilah yang menarik untuk dibahas sebab yang diketahui masyarakat awam hanyalah Jambi dengan Kesultannya. Untuk itu, dengan adanya penulisan ini diharapkan mampu menambah wawasan mengenai pengaruh politik kolonial dan desentralisasi di daerah Jambi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik sumber, interprestasi dan historiografi. Menurut Louis Gottschalk, metode sejarah merupakan proses menguji dan mengkaji secara

kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Herlina, 2020:2). Langkah pertama dalam metode sejarah ini yaitu heuristik, dimana heuristik ini sangat diperlukan untuk kelengkapan penelitian sebagai tahapan pengumpulan sumber yang relevan. Langkah selanjutnya adalah kritik sumber, dimana kritik sumber ini merupakan keabsahan atau keaslian suatu sumber sejarah sebagai data sejarah yang asli yang dapat digunakan dalam penelitian, setelah melakukan kritik sumber langkah berikutnya adalah interpretasi, interpretasi ini adalah proses untuk menafsirkan dan menganalisis sumber sejarah yang telah diuji keabsahannya. Yang terakhir adalah historiografi yang merupakan proses penulisan kembali dengan menggunakan sumber dan data-data sejarah yang telah diverifikasikan dan dianalisis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Pengertian Politik Kolonial Belanda dan desentralisasi***

Politik kolonial Belanda merupakan suatu cara untuk menundukkan suatu daerah dengan menempati atau mengeksploitasi sumber daya yang ada di daerah tersebut baik dengan uapaya perjanjian atau dengan kekejaman (Suwondo dkk, 1979:43). Dalam pemerintahan Belanda di Nusantara, kebijakan dan sistem politik yang diterapkan Belanda berubah-ubah seperti: Politik Kolonial Konservatif (1800-1870), politik ini digunakan pada masa pemerintahan Hindia-Belanda sampai pada tanam paksa. Politik Kolonial Liberal (1870-1900), politik ini sebagai gantinya kerja paksa dihapus dan digantikan dengan kerja bebas. Politik Kolonial Etis atau yang dikenal dengan Politik etis (1900-1942), politik ini merupakan politik balas budi pemerintahan Belanda terhadap daerah jajahannya dengan memajukan kesejahteraan rakyat pribumi. Salah satu tujuan dari politik etis ini adalah untuk memajukan pendidikan kepada rakyat jajahan (Alinur, 2020:2).

Politik Kolonial Belanda ini mengubah tatanan pemerintahan Belanda dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Berubahnya sistem pemerintahan ini merupakan usaha dalam menaikkan kualitas hidup di Hindia-Belanda yang dianggap bukan lagi daerah yang bermanfaat tetapi menjadi daerah yang perlu dibesarkan agar bisa dipenuhi kebutuhan dan kualitas hidupnya (Hestiliani, 2018:211). Maka dari itu dirumuskanlah undang-undang desentralisasi yang sebenarnya hanya mengatur masalah sebagian belanja dan rumah tangga daerah-daerah yang didesentralisasikan. Daerah yang didesentralisasikan diberi otonomi dalam pengelolaan rumah tangga daerah tersebut akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan wilayah dari kekuasaan pemerintahan Belanda (Wahyono, 2009:1).

Undang-undang desentralisasi ini diterbitkan pada tahun 1903 melalui *Netherlandshce staatblad* dan *Indische staatblad*, undang-undang ini merupakan undang-undang otonomi pemerintahan pertama yang diterbitkan oleh Belanda. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka daerah-daerah di Hindia-Belanda yang telah mencukupi syarat akan diganti menjadi kota otonom yang mempunyai pemerintahan sendiri dan jauh dari pemerintah pusat (Gubernur Jendral) (Hestiliani, 2018:212-213). Undang-undang desentralisasi ini merupakan usaha pemerintahan

Belanda untuk merubah pemerintahan yang otoriter, dimana undang-undang ini membentuk *gewest* (daerah) atau bagian *gewest* yang mempunyai biaya sendiri untuk membangun daerahnya dengan wewenang dewan dalam pengelolaan keuangan yang dipisahkan dengan keuangan negara dan keuangan pribadi (Wahyono, 2009:2-3). Dalam undang-undang desentralisasi ini daerah atau *gewest* mempunyai dewan-dewan lokal, baik dewan keresidenan dan dewan kota yang mempunyai wewenang dalam mengatur daerahnya masing-masing.

### ***Pengaruh Politik Kolonial dan Desentralisasi di Daerah Jambi***

Jambi merupakan provinsi yang terletak di bagian timur pulau Sumatera, dengan luasnya kurang lebih 54.008 km persegi. Provinsi Jambi dahulunya merupakan sebuah kerajaan Melayu yang membentang 350 kilometer dari timur ke barat dan 220 kilometer dari utara ke selatan (Harun dan Sagala, 2013:88). Kerajaan Jambi dahulunya merupakan kerajaan penting karena berlokasi sangat strategis dengan jalur perdagangan di kawasan Selat Malaka terutama di daerah sekitar muara sungai Batanghari, dimana daerah ini sangat penting sebagai jalur masuk dan keluarnya barang-barang perdagangan yang berasal dari pedalaman maupun dari luar. Pusat kerajaan Jambi dahulunya di daerah Ujung Jabung namun selanjutnya pusat kekuasaan di pindahkan ke daerah Kota Jambi dibawah pimpinan Putri Selaras Pinang Masak (Rahim, 2022:1811).

Pada akhir abad ke 19 Jambi belum seutuhnya jatuh ditangan Belanda, dimana pada akhir abad tersebut pemegang kekuasaan tertinggi masih berada di tangan seorang Sultan dengan dibantu oleh Pangeran Ratu (Suwondo, 1979:21). Kekuasaan Sultan dianggap dapat bertanggung jawab memelihara keseimbangan dan secara langsung memimpin hubungan dengan negeri luar. Adapun Sultan-Sultan yang memimpin kerajaan atau Kesultanan Jambi dapat diuraikan sebagai berikut:

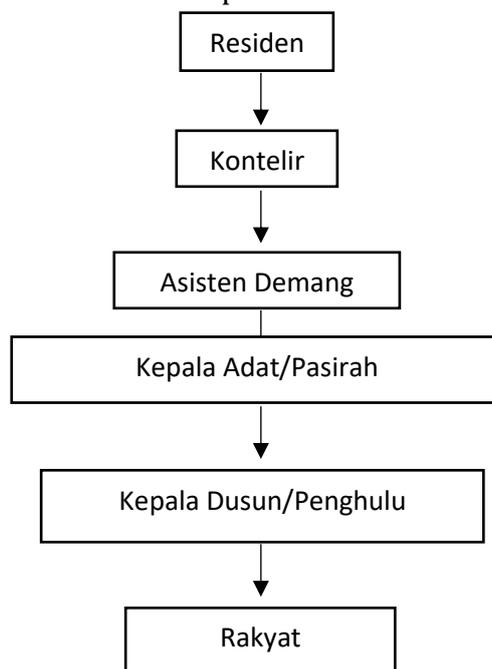
- Datuk Paduko Berhalo dan Putri Selaras Pinang Masak (1460-1480)
- Orang Kayo Pingai (1480-1490)
- Orang Kayo Hitam (1490-1500)
- Pangeran Hilang Diair (1515-1590)
- Panembahan Rengas Pandak (1540-1565)
- Panembahan Bawah Sawo (1565-1590)
- Panembahan Kota Baru (1590-1615)
- Sultan Abdul Kahar (1615-1643)
- Pangeran Depati Anom/Sultan Agung (1643-1665)
- Sultan Ingologo (1665-1690)
- Sultan Kiyai Gede (1690-1696)
- Sultan Mochamad Syah (1696-1740)
- Sultan Sri Ingologo (1740-1770)
- Sultan Zainuddin (1770-1790)
- Sultan Mas'ud Badaruddin (1790-1812)
- Sultan Mahmud Muhieddin (1812-1833)

- Sultan Muhammad Fakhruddin (1833-1841)
- Sultan Abdul Rahman Nazaruddin (1841-1855)
- Sultan Thaha Saifuddin (1855-1858)
- Sultan Ahmad Nazaruddin (1855-1881)
- Sultan Muhammad Muhieddin (1881-1885)
- Sultan Ahmad Zainul Abidin (1885-1899)
- Sultan Thaha Saifuddin (1900-1904)

Kesultanan Melayu Jambi ini berakhir pada tahun 1904, ketika gugurnya Sultan Thaha Saifuddin dan Belanda yang berhasil dalam menghancurkan perlawanan rakyat Jambi. Dengan begitu kekuasaan kesultanan Jambi diambil alih oleh Belanda dan dibentuklah Keresidenan dibawah pimpinan Belanda (Harun dan Sagala, 2013:91).

Keresidenan sendiri merupakan sebuah jabatan yang struktural dalam pemerintahan Belanda dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah kekuasaannya. Dalam pemerintahan Belanda Keresidenan merupakan sebuah daerah administratif yang dipimpin oleh residen (Sari, 2021:1-2). Pada tahun 1906 berdirilah Keresidenan Jambi sesuai ketentuan Belanda yang berlandaskan Indische Staatsblad 1906 no 187. Dalam pembagian wilayah, jambi dibagi atas beberapa daerah yang disebut *afdeeling* yang terdiri dari 7 wilayah: Jambi, Muara Tembesi, Muara Tebo, Muara Bungo, Bangko, Sarolangun, dan Kerinci (Suwondo, 1979: 45). Daerah-daerah ini dikepalai oleh Demang yang kemudian dibagi lagi menjadi asisten demang yang memimpin onder distrik. Dalam pemerintahan asisten demang ini dibantu oleh kepala-kepala adat dan kepala-kepala dusun. Dalam pemerintahan Belanda ini mempunyai prinsip yaitu mempertemukan masyarakat menurut tempat tinggal dengan menggabungkan sejumlah dusun yang ada di dalam daerah hukumnya. Dengan begitu Jambi bisa dicantumkan ke dalam himpunan ketatanegaraan Belanda. Secara struktural pemerintahan Belanda sejak waktu ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 1** Struktur pemerintahan Belanda



**Keterangan:**

Residen	= Kepala Keresidenan
Kontelir	= Kepala Kabupaten
Demang	= Kepala Kewedanan
Asisten Demang	= Kepala Kecamatan
Kepala Adat/Pasirah	= Kepala wilayah/desa

Adapun Residen Jambi nan memerintah dalam kurun waktu 1906-1942, yakni:

1. O.L. Helfrich (1906-1908)
2. A.J.N Engeleberg (1908-1910)
3. Th.A.L. Heyting (1910-1913)
4. AL. Kamerling (1913-1915)
5. H.E.C. Quast (1915-1918)
6. H.I.C. Petri (1918-1923)
7. C. Poortman (1923-1925)
8. G.J. Van Dongen (1925-1927)
9. H.E.K Ezerman (1927-1928)
10. J.R.F. Verschoor Van Niesse (1928-1931)
11. W.S Teinbucs (1931-1933)
12. Ph.J. Van Der Meulen (1933-1936)
13. M.J Ruyschhaver (1936-1940)
14. Reuvers (1940-1942)

Setelah Jambi menjadi daerah keresidenan, ditahun 1918 sampai 1922 ialah tahun naiknya hasil perdagangan beras, karet, kopra, rotan dan damar. Saat itu Kota Jambi adalah kota pelabuhan perniagaan terakbar di Sumatera Tengah. Selain Kota Jambi, Kerinci juga merupakan tempat penghasil padi dan kopi serta teh, hal itu membuat Kerinci sebagai lumbung padi Sumatera (Suwondo, 1979:68). Sehingga jelas sudah perekonomian ditahun ini sangat maju begitu pesat. Semenjak dibangunnya pelabuhan, transaksi jual beli di Jambi kian efektif yang berpengaruh pada perekonomian masyarakat Jambi. Ditahun 1925 sampai 1928 merupakan masa puncaknya perdagangan dan perekonomian di Jambi sehingga disebut dengan istilah hujan emas, dimana istilah ini muncul karena harga karet di Jambi melonjak naik sehingga itu berdampak pada pendapatan masyarakat Jambi (Sari, 2021:67). Selain dalam perkembangan perekonomian dan perdagangan, pemerintah Belanda juga membangun sekolah untuk masyarakat pribumi yaitu Hollands Inlandsche school yang kini menjadi SMP Negeri 1 Kota Jambi.

Pada saat keruntuhan pemerintahan Belanda di Indonesia, kekuasaan Belanda atas Jambi baru berusia 36 tahun sebelum terjadinya peralihan kekuasaan Jepang. Melemahnya kekuasaan Belanda di Indonesia disebabkan Perang Dunia II mengancam

negeri Belanda dan masuknya kekuasaan Jepang ke Indonesia membuat pemerintah Belanda harus siap siaga, sehingga pemerintah Belanda berusaha mempertahankan kekuasaannya di Indonesia sebab pecahnya perang dunia II mengakibatkan negeri Belanda diduduki oleh Nazi Jerman pada 10 Mei 1940 (suwondo, 1979:104). Melemahnya kekuasaan ini membuka kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan pergerakan nasional diseluruh daerah termasuk Jambi. Hal ini membangkitkan semangat masyarakat untuk menghirup udara kebebasan dan terlepas dari penjajahan. Oleh karena itu organisasi-organisasi pergerakan nasional di Jambi maupun di daerah-daerah lainnya serta partai-partai yang anti Belanda sangat bersemangat dalam mengusir Belanda dari tanah Jambi. Masuknya kekuasaan Jepang di Indonesia merupakan angin segar bagi masyarakat Jambi, rakyat Jambi menyambut dengan gembira datangnya Jepang. Rakyat Jambi puas melihat orang-orang Belanda dan tentara-tentara Belanda melarikan diri serta rakyat Jambi menunjukkan dimana tempat-tempat persembunyian Belanda pada tentara Jepang. Singkatnya, pada tanggal 10 Mei 1942 seluruh daerah Jambi dikuasai oleh Jepang. Sejalan dengan masuknya Jepang ke Jambi berakhirlah kekuasaan Belanda dan runtuhnya Keresidenan Jambi.

Politik kolonial ini berpengaruh terhadap adanya desentralisasi yang terjadi di daerah-daerah Indonesia, dengan adanya desentralisasi ini memudahkan pemerintah Belanda dalam mengatur daerah jajahannya serta sebagai upaya Belanda dalam melindungi dan meningkatkan taraf hidup warga negaranya yang berada di Indonesia. Dengan adanya desentralisasi dan keresidenan di daerah Jambi ini menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif yang dapat dirasakan ialah berkembang pesatnya perdagangan serta perekonomian masyarakat Jambi. Dari sektor perdagangan, pelabuhan yang merupakan alat transportasi yang bisa dibilang sebagai wadah penunjang perekonomian keresidenan terus dilakukan perbaikan agar perekonomian keresidenan kala itu tetap meningkat. Lalu dalam bidang pendidikan, pemerintah Belanda mendirikan sekolah untuk pribumi dan sekolah khusus untuk anak-anak Belanda. Selain dampak positif ada juga dampak negatif dari adanya desentralisasi ini yaitu pada tahun 1930 saat terjadinya depresi ekonomi membuat harga barang-barang turun dan jatuhnya harga karet ini berimbas pada petani-petani karet yang merasa depresi akan kehilangan kemakmurannya serta adanya kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah Belanda yaitu pembatasan produksi bahan pokok, adanya biaya cukai yang sangat tinggi dan tekanan pajak yang memberatkan sehingga membuat keadaan rakyat semakin menderita.

## **KESIMPULAN**

Terbentuknya Keresidenan ini bermula dari undang-undang desentralisasi yang digaungkan pemerintah Belanda untuk daerah Jajahannya. Undang-undang desentralisasi ini hanya mengatur masalah keuangan daerah-daerah yang didesentralisasikan, maksudnya daerah-daerah yang telah mencukupi syarat akan diubah menjadi kota otonomi yang memiliki pemerintahan sendiri tetapi tetap mematuhi aturan pemerintah pusat (Gubernur Jendral). Maka dari itu pemerintah

Belanda membentuk Keresidenan di daerah-daerah Indonesia dengan tujuan untuk mengeksploitasi dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup warna negaranya di daerah jajahannya. Di Indonesia sendiri kala itu terdapat 13 keresidenan Belanda yang berdiri di daerah-daerah seperti Keresidenan Bogor, Banyumas, Aceh, Basuki, Jakarta Barat, Bnaten, Karawang, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, Palembang, Padang dan Keresidenan Jambi.

Per tahun 1901 Kesultanan Jambi telah ikut ke dalam Keresidenan Palembang. Ditahun 1904 gugurnya Sultan Thaha menyebabkan Kesultanan jatuh ditangan Belanda, dengan begitu kesempatan Belanda menguasai Jambi semakin mudah terlihat pada tahun 1906 Jambi telah menjadi Keresidenan sesuai keputusan Belanda dengan Residen pertamanya O.L. Helfrrieh. Dalam keresidenan ini wilayah Jambi dibagi atas beberapa daerah atau yang disebut dengan *afdeeling* yaitu Kota Jambi, Muara Tembesi, Muara Tebo, Muara Bungo, Bangko, Sarolangun dan Kerinci.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alinur. (2020). *"Politik Etis Pada Masa Kolonialisme Belanda di Indonesia."* Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
- Harun, H., & Sagala, I. (2013). *Dinamika model pemerintahan dalam masyarakat Melayu Islam Jambi: studi kasus kabupaten Bungo.* Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Herlina, N. (2020). Metode sejarah.
- Hestiliani, T. (2019). Decentralisatie Wet van Nederland Indies 1903. *ISTORIA Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah, 15(2).*
- Irawan, M. (2014). *"Citra Jambi Dalam Arsip."* Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Margono, H. (1984). "Sejarah Sosial Jambi: Jambi Sebagai Kota Dagang." Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Masjkuri. (1979). *"Sultan Thaha Saifuddin."* Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Putra, B. A. (2018). "Sejarah Melayu Jambi dari Abad 7 Sampai Abad 20." *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam, 3(1), 1-14.*
- Rahim, A. (2022). Kerajaan Jambi dan Pengaruh Islam. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3), 1811-1823.*
- Sari, P. S.(2021). *"Sejarah Jambi Pada Masa Keresidenan (1906-1942)."* (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari).
- Sumarni, N. (2022). "Sejarah Kesultanan Jambi Menurut Naskah "Ini Sejarah Kerajaan Jambi". *Malay Studies: History, Culture and Civilization, 1(1), 1-17.*
- Suwondo, B. (1979). *"Sejarah Kebangkitan Nasional Jambi."* Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Wahyono, E. (2009). *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Jawa Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda: Perubahan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Bestuurshervormingswet 1922.*|| Disertasi Doktor Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia (tidak diterbitkan). Depok: FIB UI.